Butir – butir pertanyaan wawancara

Narasumber : Bapak Ade Awaludin

Jabatan : Kepala Pelaksana Penyelenggara Syariah KEMENAG Kuningan.

Hari/tanggal : Selasa, 1 Mei 2018

Jam : 10.30 – 11.45

1. Seberapa pentingkah kehalalan suatu produk bagi konsumen ?

Sangat penting , mengingat Indonesia adalah negara muslim tebanyak di dunia dan kewajiban juga untuk mengkonsusmi makan halal.

1. Instansi atau lembaga manakah yang berewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk ?

Awalnya yang berwenang menangani setifikasi halal adalah lembaga 6 Januari 1989 yang biasa kita kenal dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – obatan, dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan tetapi pada tanggal 17 November 2017 pemerintah membentuk badan khusus di bawah kementrian agama badan tersebut bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

1. Bagaimana alur atau proses untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu produk mulai registrasi sampai penerbitan nomor sertfikasi?

Proses penerbitan sertitifikasi halal tentunya tidak mudah, ada beberapa tahap – tahap yang harus di lalui, baik itu dari segi uji kandungan giji, uji lab kesehatan, dan serangkaian tes yang di lakukan oleh lembaga terkait, dan untuk saat ini itu hanya bisa di lakukan oleh Pusat dan di tingkat provinsi ataupun daerah masih belum ada.

1. Bagi lembaga, Adakah sistem (komputerisasi) terpadu untuk mengelola data ke halalan suatu produk ?

Untuk saat ini belum ada, karna belum ada kejelasan lembaganya, di perkirakan molor bebrapa bulan, unutk saat ini saja BPJPH hanya ada di pusat (Jakarta), dan di tingkat propinsi atau kabupatenpun belum ada, apalagi sistemnya yang terkommputerisasi itu belum ada sama sekali.

1. Bagi konsumen, bagaimana mengetahui kehalalan suatu produk?

Jelas penting sekali, karna mayoritas konsumen di negara kita adalah muslim jadi perlu bagi setiap muslim mengetahui kehalalan suatu produk.

1. Adakah aplikasi yang bisa mengecek keaslian kehalalan suatu produk?

Sampai saat ini belum ada, sistemnya ppun belum ada, akan tetapi jika lembaga BPJPH sudah terbentuk inysaalllah akan di buat sebuah sistem yang mengelola kehalalan suatu produk.

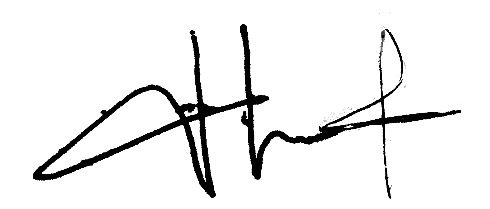
1. Apa dasar hukum yang melatar belakagi pembuatan sertifikasi halal?

UU No 33 tahun 2014 (UU JPH ) atau Undang – Undang Jaminan Produk Halal dan sebagai cara atau jalan untuk melindungi konsumen.

1. Adakah draf aturan penerbitan setrtifikasi halal?

* Ada, semuanya sudah tertuang di dalam buku yang di susun oleh Tim dari kemenrian Agama. (Buku Di pinjamkan).

Narasumber

Kepala Pelaksana Syariah

Ade Alimudin

4

